



Analisis Keberlanjutan Kawasan Permukiman Di Bantaran Sungai Kelurahan Sendangguwo Semarang

Andarina Aji Pamurti^{1*}, Wahjoerini¹, Dwi Prabowo¹

¹ Fakultas Teknik, Universitas Semarang, Indonesia

*Korespondensi: andarina@usm.ac.id

Info Artikel

Diterima 13
Juni 2023

Disetujui 26
Juli 2023

Dipublikasikan 05
Agustus 2023

Keywords:
Keberlanjutan,
Permukiman,
Bantaran Sungai

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Tingkat urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kepadatan jumlah penduduk Kota Semarang. Kurangnya perekonomian dan kebutuhan akan rumah sehingga menimbulkan permukiman yang menempati sekitar bantaran sungai salah satunya adalah di Kelurahan Sendangguwo Semarang. Kawasan permukiman di sekitar bantaran sungai, perlu memperhatikan beberapa aspek. Aspek tersebut adalah penempatan bangunan yang sesuai dengan garis sempadan sungai, kesehatan lingkungan dan kualitas hunian, kemudahan pemenuhan akan sarana dan prasarana, kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keberlanjutan permukiman di sekitar bantaran sungai Sendangguwo Semarang. Dalam mewujudkan keberlanjutan perlu memiliki empat pilar yang perlu diperhatikan yaitu keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan analisis deskriptif kuantitatif. Analisa penelitian ini adalah analisa lingkungan, sosial, ekonomi, hukum dan analisis tingkat berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dalam penataan permukiman serta berkehidupan di permukiman bantaran sungai Kelurahan Sendangguwo Semarang. Berdasar hasil analisa, pilar lingkungan memiliki score 2,86 sedangkan pilar sosial dengan score 2,87 dan pilar ekonomi dengan score 2,92 serta pilar hukum dengan score 2,92. Berdasarkan rata-rata, permukiman bantaran sungai Kelurahan Sendangguwo secara multi pilar adalah dengan score 2,89. Yaitu menunjukkan bahwa permukiman bantaran sungai di Kelurahan Sendangguwo adalah masuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang.

Abstract

The high level of urbanization resulted in the density of the population of Semarang City. The lack of economy and the need for housing has led to settlements that occupy around the riverbanks, one of which is in the Sendangguwo Village, Semarang. Residential areas around riverbanks need to pay attention to several aspects. These aspects are the placement of buildings in accordance with river border lines, environmental health and quality of housing, ease of fulfillment of facilities and infrastructure, social, economic and legal life. The purpose of this study was to assess the level of sustainability of settlements around the banks of the Sendangguwo river, Semarang. In realizing sustainability, it is necessary to have four pillars that need to be considered, namely the balance of economic, social, environmental and legal. The research approach used is quantitative descriptive analysis. The analysis of this research is the analysis of environmental, social, economic, legal and sustainable level analysis. The results of this study can be used in structuring settlements and living in

settlements along the river, Sendangguwo Village, Semarang. Based on the analysis, the environmental pillar has a score of 2.86, while the social pillar has a score of 2.87 and the economic pillar has a score of 2.92 and the legal pillar has a score of 2.92. Based on the average, the multi-pillar settlements on the riverbanks of Sendangguwo Village are with a score of 2.89. That shows that the settlements along the river in Sendangguwo Village are included in the category of Medium level of sustainability.

1. Pendahuluan

Perkembangan saat ini, lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota yang sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi, mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah megapolitan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat di Indonesia dipacu oleh urbanisasi (Santosa et al., 2012). Kampung Kota secara umum diketahui sebagai suatu pemukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota (Pigawati, 2015). Perkembangan penduduk dan pembangunan yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya peluang investasi dan lapangan kerja. Sementara dampak negatifnya yaitu terdapat penurunan kualitas lingkungan seperti alih fungsi area sempadan sungai menjadi permukiman. Manusia membutuhkan ruang, begitu juga dengan alam. Fenomena banjir menunjukkan bahwa air membutuhkan ruang, namun ruang air tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan karena pemerintah kurang tanggap dalam pengendalian pertumbuhan dan penyediaan pelayanan kota yang memadai (Nur M. Munzil, Dompok Napitupulu, 2021). Prasarana permukiman seperti drainase dapat dilakukan dengan lebih merata dan dibiayai oleh pemerintah setempat (Widodo & Yuliasuti, 2013). Implementasi pendekatan yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan maka permukiman kumuh di perkotaan dapat diselesaikan (Faiztyan et al., 2015).

Konsep untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan adalah konsep permukiman yang berwawasan lingkungan (Hamidah et al., 2017). Pembangunan masa kini tanpa mengorbankan hak-hak masa depan adalah pengertian keberlanjutan (Yusuf & Prayogi, 2020). Seperangkat prinsip dan pandangan yang berorientasi pada masa depan, secara sederhana adalah konsep keberlanjutan (Agustina, 2007). Aspek lingkungan dan aspek pembangunan merupakan dua aspek penting yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam pembangunan berkelanjutan (Simarmata, et al., 2021)

Konsep dasar keberlanjutan yaitu pembangunan yang menyiapkan perbaikan pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum. Pilar sosial adalah pemenuhan hak dasar manusia yang tercapai dan berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilar lingkungan adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pilar Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industry inklusif dan infrastruktur memadai. Pilar hukum adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif dan partisipatif untuk menciptakan

stabilitas keamanan. Kawasan permukiman yang terletak di area yang berdekatan dengan kawasan industri maupun perdagangan dan jasa hendaknya dapat memanfaatkan lahan sisa untuk mengimbangi aktivitas disekitar area permukiman yang padat. Upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup adalah pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Ayat & Jonizar, 2020). Ketersediaan elemen vital seperti air dan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya merupakan faktor penting pelestarian lingkungan (Lisbet et al., 2013).

Dilakukan penyuluhan dan pengawasan dalam penggunaan jalan dan drainase serta pengawasan peran dan keaktifan lembaga masyarakat dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan sosial serta pelibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk menginisiasi masyarakat untuk memelihara lingkungan (Azmi & Sunarti, 2020). Perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan di kota tersebut serta proses yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungannya adalah pencapaian pembangunan berkelanjutan (Dewi, 2011).

Permukiman di sekitar bantaran sungai yang terletak di Kelurahan Sendangguwo merupakan permukiman yang berbatasan dengan Pasar Gayam Sari. Permukiman ini terdiri dari hunian permanen dan non permanen. Terdapat 60% hunian permanen terletak di sisi batas dengan sungai. Hunian di permukiman ini terdiri dari unit kecil dengan ventilasi udara yang minim. Masyarakat sebagian besar melakukan kegiatan mencuci di area depan rumah. Kondisi sungai terdapat pembuangan limbah domestic warga. Mata pencaharian masyarakat adalah pedagang kecil dan buruh. Penghasilan harian dan bulanan tidak dapat dipastikan jumlahnya. Untuk penghasilan berada pada garis bawah Upah Minimum Kota Semarang. Pendidikan masyarakat adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang disebutkan bahwa Garis Sempadan Sungai (GSS) ditetapkan minimal 3meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul. Namun pada eksisitng, permukiman tepat di sebelah kaki tanggul dan terdapat penumpukan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keberlanjutan permukiman di sekitar bantaran sungai Sendangguwo Semarang.

2. Metode Penelitian

Pilar lingkungan yang dianalisa adalah sumber air bersih, sistem pembuangan limbah, kualitas material bangunan, kecukupan luas hunian, aspek bencana dan pengelolaan sampah. Untuk pilar sosial adalah aspek pendidikan masyarakat, aspek kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan, bidang sosial tenaga ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan perempuan. Dan pilar ekonomi adalah pendapatan masyarakat, jarak permukiman dengan jalan yang layak, penyerapan tenaga kerja, nilai ekonomi lahan, dan nilai ekonomi hunian. Sedangkan pilar hukum adalah kepemilikan sertifikat tanah, aspek kriminalitas, aspek keamanan, kepemilikan sertifikat kelahiran dan aspek konflik penduduk. Analisis Tingkat Keberlanjutan Permukiman merupakan analisis akhir dalam menentukan keberlanjutan permukiman. Dalam analisis ini akan diperlihatkan bagaimana total pembobotan

pada masing-masing variabel yang diteliti. Untuk menentukan tingkat keberlanjutan dari hasil wawancara dengan responden maka digunakan score. Dari hasil wawancara ditentukan tingkat keberlanjutan dapat dilihat dari score pada Tabel 1:

Tabel 1. Score Tingkat Keberlanjutan

No.	Kriteria	Score
1.	Tinggi keberlanjutan	4
2.	Sedang keberlanjutan	3
3.	Rendah keberlanjutan	2
4.	Sangat rendah keberlanjutan	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Nilai tertinggi yaitu 4 dan nilai terendah adalah 1. Dimana dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut dan interval yang tercantum pada tabel 2:

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Kelas}} \\ &= \frac{4 - 1}{4} \\ &= 7,5 \end{aligned}$$

Tabel 2. Interval Tingkat Keberlanjutan

No.	Score	Kriteria
1.	1 – 1,75	Sangat rendah keberlanjutan
2.	1,76 – 2,50	Rendah keberlanjutan
3.	2,51 – 3,25	Sedang keberlanjutan
4.	3,26 - 4	Tinggi keberlanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 3. Score Pada Indikator

No.	Keterangan	Indikator	Tingkat Keberlanjutan	Score
Lingkungan				
1.	Sumber Air Bersih	PDAM dan sumur terlindungi	Tinggi	4
		Sumur tidak terlindungi	Sedang	3
		Sungai	Rendah	2
		Tidak ada mata air	Sangat rendah	1
2.	Sistem pembuangan limbah	Melalui septictank pribadi yang tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat dan menggunakan closet leher angsa	Tinggi	4
		Melalui septictank dengan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik	Sedang	3
		Pembuangan di sarana umum seperti masjid, toilet umum dan fasilitas umum lainnya	Rendah	2
		Pembuangan melalui sungai atau tidak ada tempat pembuangan	Sangat rendah	1
3.	Kualitas material bangunan hunian	Atap genteng, dinding tembok, lantai keramik / teraso	Tinggi	4
		Atap asbes / seng, dinding tembok, lantai keramik / teraso	Sedang	3
		Atap asbes / seng, dinding tembok, lantai plesteran semen	Rendah	2
		Atap asbes / seng, dinding GRC Board/papan, lantai plesteran semen	Sangat rendah	1

4.	Kecukupan luas hunian	Luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m ²	Tinggi	4
		Luas lantai per kapita 7,1 – 6,5 m ²	Sedang	3
		Luas lantai per kapitan 6,4 – 5,5 m ²	Rendah	2
		Luas lantai per kapita < 5,4 m ²	Sangat rendah	1
5.	Tingkat Bencana	Tidak banjir dan tidak ada tanah longsor	Tinggi	4
		Ada banjir, tetapi tidak ada tanah longsor	Sedang	3
		Ada banjir dan tanah longsor	Rendah	2
		Ada banjir, ada tanah longsor, ada bencana lainnya	Sangat rendah	1
6.	Sistem pengelolaan sampah	Sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Tinggi	4
		Sistem pengangkutan sampah ke TPS	Sedang	3
		Pembakaran sampah	Rendah	2
		Pembuangan ke sungai	Sangat rendah	1
Sosial				
1.	Aspek kesehatan masyarakat	Tidak ada penyakit kekurangan gizi, tidak ada kelaparan dan tidak ada penyakit Tuberkulosis	Tinggi	4
		Tidak ada penyakit kekurangan gizi, tidak ada kelaparan dan ada penyakit Tuberkulosis	Sedang	3
		Ada penyakit kekurangan gizi, tidak ada kelaparan dan ada penyakit Tuberkulosis	Rendah	2
		Ada penyakit kekurangan gizi, ada kelaparan dan ada penyakit Tuberkulosis	Sangat rendah	1
2.	Jaminan kesehatan	Memiliki BPJS dan Kartu Sehat, akses fasilitas kesehatan mudah	Tinggi	4
		Tidak memiliki BPJS, memiliki Kartu Sehat, akses fasilitas kesehatan mudah	Sedang	3
		Tidak memiliki BPJS dan Kartu Sehat, akses fasilitas kesehatan mudah	Rendah	2
		Tidak memiliki BPJS dan Kartu Sehat, akses fasilitas kesehatan rendah	Sangat rendah	1
3.	Aspek pendidikan masyarakat	Penyelesaian hingga tingkat SMA	Tinggi	4
		Penyelesaian hingga tingkat SMP	Sedang	3
		Penyelesaian hingga tingkat SD	Rendah	2
		Tidak sekolah	Sangat rendah	1
4.	Jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan	Ada jaminan kecelakaan, jaminan hari tua/jaminan pensiun, jaminan kematian	Tinggi	4
		Ada jaminan kecelakaan, jaminan hari tua/pensiun, tetapi tidak ada jaminan kematian	Sedang	3
		Ada jaminan kecelakaan, tetapi tidak ada jaminan hari tua/pensiun dan kematian	Rendah	2
		Tidak ada jaminan kecelakaan, jaminan hari tua/pensiun dan kematian	Sangat Rendah	1
5.	Pelayanan kesehatan perempuan (kepedulian akan perempuan)	Ada layanan maternal, Keluarga Berencana (KB), pendidikan kesehatan perempuan	Tinggi	4
		Ada layanan maternal dan Keluarga Berencana (KB), tetapi tidak ada layanan pendidikan kesehatan perempuan	Sedang	3
		Ada layanan maternal, tetapi tidak ada layanan Keluarga Berencana (KB) dan pendidikan kesehatan perempuan	Rendah	2
		Tidak ada layanan maternal, Keluarga Berencana (KB), pendidikan kesehatan perempuan	Sangat rendah	1
Ekonomi				
1.	Aspek	Diatas Upah Minimum Regional	Tinggi	4

pendapatan masyarakat	Setara Upah Minimum Regional	Sedang	3
	Dibawah Upah Minimum Regional	Rendah	2
	Pengangguran	Sangat rendah	1
2. Jarak permukiman dengan jalan yang layak	Jarak permukiman dengan jalan yang layak \leq 2 Km	Tinggi	4
	Jarak permukiman dengan jalan yang layak 2,1 – 2,5 Kilometer	Sedang	3
	Jarak permukiman dengan jalan yang layak 2,6 – 3 Kilometer	Rendah	2
	Jarak permukiman dengan jalan yang layak \geq 3,1 km	Sangat rendah	1
3. Penyerapan tenaga kerja	Bekerja 2 km dari tempat tinggal	Tinggi	4
	Bekerja 5 km dari tempat tinggal	Sedang	3
	Bekerja 10 km dari tempat tinggal	Rendah	2
	Bekerja >10 km dari tempat tinggal	Sangat rendah	1
4. Nilai ekonomi lahan	Melebihi nilai Nilai Jual Objek Pajak	Tinggi	4
	Setara dengan Nilai Jual Objek Pajak	Sedang	3
	Kurang dari Nilai Jual Objek Pajak	Rendah	2
	Tidak memiliki nilai karena ilegal	Sangat rendah	1
5. Nilai ekonomi bangunan rumah	Melebihi nilai Nilai Jual Objek Pajak	Tinggi	4
	Setara dengan Nilai Jual Objek Pajak	Sedang	3
	Kurang dari Nilai Jual Objek Pajak	Rendah	2
	Tidak memiliki nilai karena ilegal	Sangat rendah	1
Hukum			
1. Kepemilikan Sertifikat Tanah	Sertifikat Hak Milik	Tinggi	4
	Sertifikat Hak Guna Bangunan	Sedang	3
	Surat keterangan dari kelurahan	Rendah	2
	Tidak memiliki Sertifikat dan Surat Keterangan	Sangat rendah	1
2. Aspek kriminalitas	Tidak ada kriminalitas	Tinggi	4
	Terjadi 1x tindakan kriminalitas dalam 1 tahun	Sedang	3
	Terjadi 2x tindakan kriminalitas dalam 1 tahun	Rendah	2
	Terjadi lebih dari 3x tindakan kriminalitas dalam 1 tahun	Sangat rendah	1
3. Aspek keamanan (berjalan di area permukiman)	Merasa aman berjalan di pagi, siang dan malam	Tinggi	4
	Merasa aman berjalan di pagi dan siang, tetapi malam merasa tidak aman	Sedang	3
	Merasa aman berjalan di pagi, tetapi siang dan malam merasa tidak aman	Rendah	2
	Tidak Merasa aman berjalan di pagi, siang, dan malam	Sangat rendah	1
4. Kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-5 th	Kepemilikan setelah 60 hari sejak kelahiran	Tinggi	4
	Kepemilikan setelah 60 hari – 1 tahun sejak kelahiran	Sedang	3
	Kepemilikan setelah 2 - 3 tahun sejak kelahiran	Rendah	2
	Kepemilikan setelah 4 - 5 tahun sejak kelahiran	Sangat rendah	1
5. Aspek konflik penduduk	Tidak ada konflik penduduk	Tinggi	4
	Terjadi 1x konflik penduduk dalam 1 tahun	Sedang	3
	Terjadi 2x konflik penduduk dalam 1 tahun	Rendah	2
	Terjadi lebih dari 3x konflik penduduk dalam 1 tahun	Sangat rendah	1

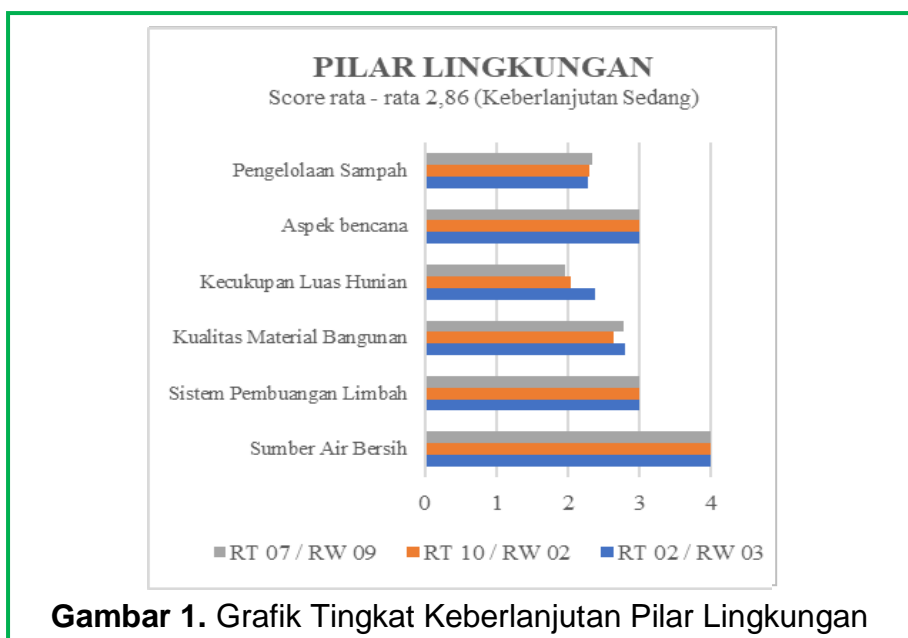
Sumber: Analisis, 2023

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Pilar Lingkungan

Rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, menggunakan pipa, keran di halaman rumah, hidran umum, air yang terlindungi, dan penampungan air hujan merupakan sumber air minum layak (Bappenas, 2020a). Permukiman bantaran sungai Kelurahan Sendangguwo Semarang, sumber air bersih nya sebagian besar adalah menggunakan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) dan sumur artesis yang terlindungi, oleh karena itu memiliki score 4 yaitu tinggi keberlanjutan. Untuk sistem pengelolaan limbah padatnya mayoritas melalui septictank dengan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik, memiliki score 3 yaitu sedang keberlanjutan. Berdasar kualitas material bangunan, sebagian besar menggunakan atap asbes atau seng, dinding tembok dan lantai keramik atau teraso yaitu memiliki score 2,64-2,80 yang berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Sedangkan kecukupan luas hunian, mayoritas hunian memiliki luas 6,4-5,5 m² per kapita yaitu memiliki score 1,97-2,39 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan.

Berdasar aspek bencana, permukiman ini seringkali terjadi banjir terutama saat musim penghujan, namun di permukiman ini tidak terjadi tanah longsor, oleh karena itu memiliki score 3 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Banjir diakibatkan karena luapan volume air sungai dikarenakan adanya hambatan dari sampah domestik masyarakat yang dibuang ke sungai. Untuk sistem pengelolaan sampah, masyarakat melakukan 3 cara yaitu adanya sistem pengangkutan sampah ke TPS, terdapat juga adanya pembakaran sampah dan pembuangan sampah ke sungai yakni memiliki score 2,28-2,34 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan. Jadi berdasar pilar lingkungan, rata-rata tingkat keberlanjutan yakni memiliki score 2,86 keberlanjutan maka termasuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang. Masyarakat sekitar bantaran sungai, disamping menggunakan lahan bantaran untuk kebutuhan bermukim namun tidak diimbangi dengan kesadaran akan menjaga lingkungan permukiman tempat tinggal mereka.



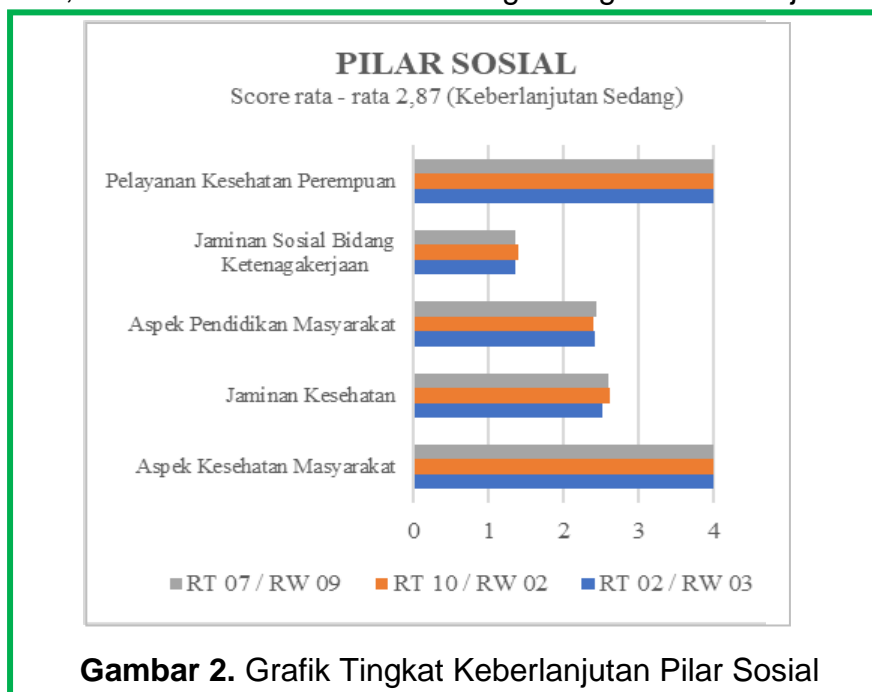
Gambar 1. Grafik Tingkat Keberlanjutan Pilar Lingkungan

Sumber: Analisis, 2023

Analisis Pilar Sosial

Berdasar aspek kesehatan masyarakat, masyarakat di permukiman ini tidak memiliki penyakit kekurangan gizi, tidak ada kelaparan dan tidak ada penyakit TBC yaitu memiliki score 4 yaitu termasuk dalam kategori tinggi keberlanjutan. Dan berdasar jaminan kesehatan, sebagian besar tidak memiliki BPJS, tetapi memiliki Kartu Sehat dan mudahnya akses fasilitas kesehatan yaitu memiliki score 2,51-2,62 berbeda untuk setiap RT, yaitu dalam kategori sedang keberlanjutan. Sedangkan berdasar aspek pendidikan masyarakat, sebagian besar adalah tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak sekolah memiliki score 2,40-2,43 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan. Indikator ini menunjukkan besarnya partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan (Bappenas, 2020b).

Sedangkan berdasar jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, mayoritas tidak ada jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan kematian yaitu memiliki score 1,35-1,40 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori sangat rendah keberlanjutan. Dan berdasar pelayanan kesehatan terhadap perempuan, terdapat layanan maternal, layanan informasi Keluarga Berencana (KB) dan terdapat pendidikan kesehatan perempuan, memiliki score 4 yaitu termasuk dalam kategori tinggi keberlanjutan. Berdasar pilar sosial, rata-rata tingkat keberlanjutan yakni memiliki score 2,87 maka termasuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang.



Gambar 2. Grafik Tingkat Keberlanjutan Pilar Sosial

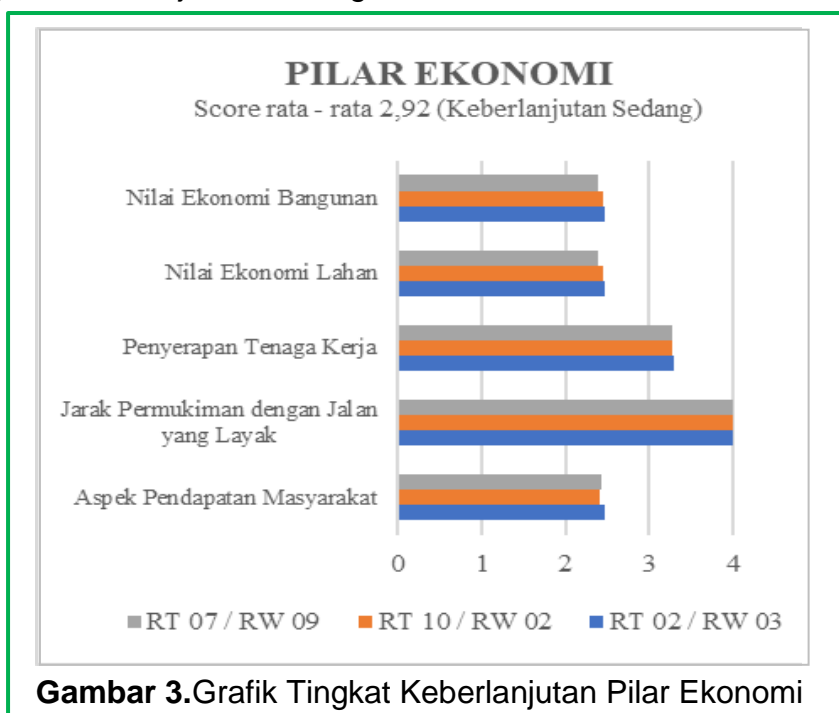
Sumber: Analisis, 2023

Analisis Pilar Ekonomi

Berdasar aspek pendapatan masyarakat, mayoritas penduduknya memiliki pendapatan dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yaitu memiliki score 2,42-2,48 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan. Sedangkan jarak permukiman dengan jalan yang layak yang merupakan kaitan dengan kemudahan akses terhadap prasarana adalah < 2 Km, memiliki score 4 yaitu termasuk dalam kategori tinggi keberlanjutan. Penyerapan tenaga kerja di permukiman ini terhadap masyarakatnya adalah mayoritas warga bekerja 2 Km dari

tempat tinggal, yaitu memiliki score 3,27-3,30 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori tinggi keberlanjutan. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran dinamakan Angkatan Kerja (Ministry of National Development Planning, 2017).

Berdasarkan nilai ekonomi lahan adalah tidak memiliki nilai karena unit rumah yang berada di sisi batas bantaran sungai merupakan rumah ilegal, namun untuk permukiman yang melebihi area batas bantaran sungai memiliki nilai lebih dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) memiliki score 2,40-2,48 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan. Nilai ekonomi bangunan pun memiliki kondisi yang sama dengan nilai ekonomi lahan. Berdasar pilar ekonomi, rata-rata tingkat keberlanjutan yakni dengan score 2,92 maka termasuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang.



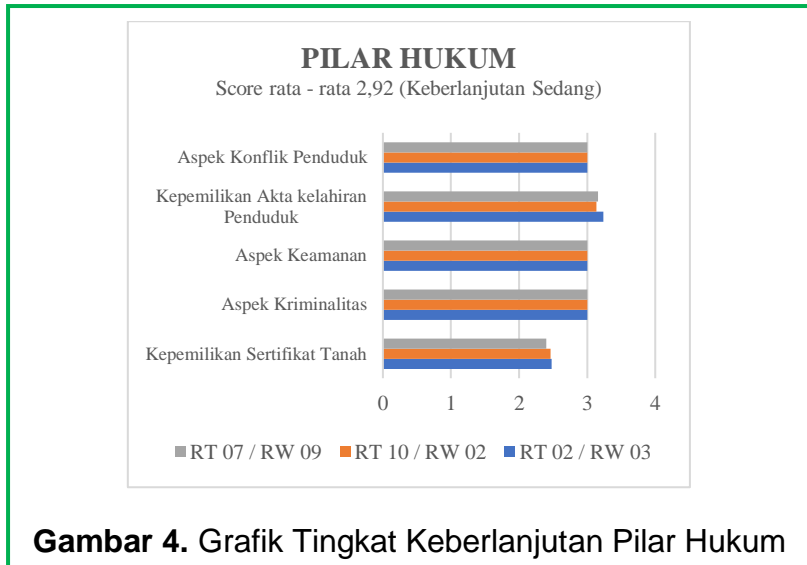
Gambar 3. Grafik Tingkat Keberlanjutan Pilar Ekonomi

Sumber: Analisis, 2023

Analisis Pilar Hukum

Berdasar kepemilikan sertifikat tanah, permukiman ini adalah tidak memiliki sertifikat dan Surat Keterangan dari kelurahan karena unit rumah yang berada di sisi batas bantaran sungai merupakan rumah ilegal, namun untuk permukiman yang melebihi area batas bantaran sungai memiliki sertifikat Hak Milik, memiliki score 2,40-2,48 berbeda untuk setiap RT yaitu termasuk dalam kategori rendah keberlanjutan. Untuk aspek kriminalitas terdapat 1x kriminalitas dalam 1 tahun namun dalam bentuk kriminalitas kecil, memiliki score 3 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Dalam segi aspek keamanan, warga merasa aman berjalan di pagi dan siang hari tetapi pada malam hari kurang merasa aman, memiliki score 3 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Yang diukur adalah jumlah kasus kejahatan pembunuhan dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kepemilikan Akta Kelahiran mayoritas diperoleh diperoleh 61 hari-1 tahun sejak kelahiran, memiliki score 3,14-

3,23 berbeda untuk setiap RT, yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Berdasar aspek konflik penduduk, terjadi 1x konflik penduduk dalam 1 tahun, namun konflik dalam bentuk kecil, memiliki score 3 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Berdasar pilar hukum, rata-rata tingkat keberlanjutan yakni dengan score 2,92 maka termasuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang.

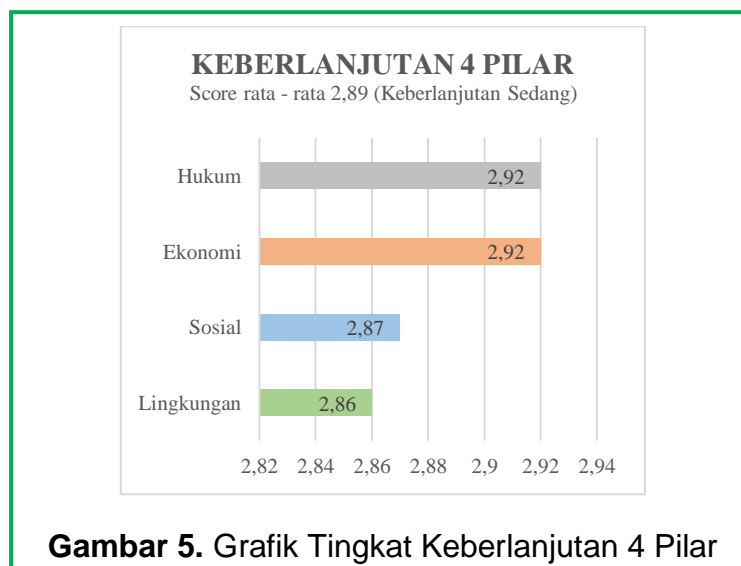


Gambar 4. Grafik Tingkat Keberlanjutan Pilar Hukum

Sumber: Analisis, 2023

Analisis 4 Pilar

Berdasar pilar lingkungan memiliki score tingkat keberlanjutan 2,86 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Untuk pilar sosial memiliki score tingkat keberlanjutan 2,87 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Sedangkan pilar ekonomi memiliki score tingkat keberlanjutan 2,92 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Dan pilar hukum memiliki score tingkat keberlanjutan 2,92 yaitu termasuk dalam kategori sedang keberlanjutan. Jadi berdasar 4 pilar yaitu rata-rata tingkat keberlanjutan yakni dengan score 2,89 maka termasuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang.



Gambar 5. Grafik Tingkat Keberlanjutan 4 Pilar

Sumber: Analisis, 2023

4. Kesimpulan

Permukiman bantaran sungai di Kelurahan Sendangguwo adalah masuk dalam kategori tingkat keberlanjutan Sedang. Pilar lingkungan yang dianalisa adalah sumber air bersih, sistem pembuangan limbah, kualitas material bangunan, kecukupan luas hunian, aspek bencana dan pengelolaan sampah. Untuk pilar sosial adalah aspek pendidikan masyarakat, aspek kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan, bidang sosial tenaga ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan perempuan. Dan pilar ekonomi adalah pendapatan masyarakat, jarak permukiman dengan jalan yang layak, penyerapan tenaga kerja, nilai ekonomi lahan, dan nilai ekonomi hunian. Sedangkan pilar hukum adalah kepemilikan sertifikat tanah, aspek kriminalitas, aspek keamanan, kepemilikan sertifikat kelahiran dan aspek konflik penduduk.

Masyarakat sekitar bantaran sungai menggunakan lahan bantaran untuk kebutuhan bermukim namun tidak diimbangi dengan kesadaran akan menjaga lingkungan permukiman tempat tinggal mereka. Aspek pengelolaan sampah belum melakukan sistem reuse, reduce, recycle. Oleh karena itu perlu suport kegiatan program 3R dari pihak kelurahan, RW, RT dan masyarakat agar keberlanjutan lingkungan permukiman terpenuhi. Dari segi aspek pendidikan masyarakat, sebagian besar masyarakat belum menempuh pendidikan hingga tingkat atas. Oleh karena itu perlu suport pihak kelurahan, RW, RT kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pemenuhan jenjang pendidikan.

Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan kawasan permukiman di permukiman bantaran sungai Kelurahan Sendangguwo dimasa mendatang adalah kondisi lingkungan permukiman terutama yang berkaitan dengan keberadaan rumah ilegal di bantaran sungai. Dikarenakan keberadaan rumah ilegal maka ketersediaan lahan yang menggunakan lahan bantaran maka kecukupan luas hunian tidak menampung kebutuhan penghuni. Disamping faktor ilegal, kebutuhan akan hidup di lingkungan ideal tidak terpenuhi, maka diperlukan relokasi permukiman tersebut.

5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak warga dan Bapak lurah serta staff Kelurahan Sendangguwo Semarang atas bantuan dan suport data untuk peneliti. Dan juga ucapan terimakasih untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Semarang atas suport dalam penyelesaian laporan penelitian.

Daftar Pustaka

- Agustina, I. H. (2007). Kajian Tentang Konsep Keberlanjutan Pada Beberapa Kota Baru Dan Permukiman Berskala Besar. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7(2), 38–55.
- Ayat, M., & Jonizar, J. (2020). Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan. *Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.32502/jbearing.2830201962>
- Azmi, H. N., & Sunarti, S. (2020). Keberlanjutan Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuningan. *Jurnal Riptek*, 14(1), 50–59.
- Bappenas. (2020a). *Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan*.

- Bappenas. (2020b). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II*.
- Dewi, R. (2011). *Pengembangan Konsep Pemukiman Berkelanjutan (Studi Kasus di Pemukiman Kumuh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)*. 1–244. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/37713>
- Faiztyan, I. F., Isnanto, R. R., & Widiyanto, E. D. (2015). Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Visualisasi 3D Interaktif Masjid Agung Jawa Tengah Menggunakan Unity3D. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 3(2), 207. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.3.2.2015.207-212>
- Hamidah, N., Rijanta, R., Setiawan, B., & Marfai, M. A. (2017). Kampung sebagai Model Permukiman Berkelanjutan di Indonesia. *INformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 12(2), 114–124.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola*.
- Lisbet, Wangke, H., Pujayanti, A., Adam, L., Martiany, D., Wahyuni, D., Teja, M., Prasetiawan, T., & Hidriyah, S. (2013). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. 262. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-9.pdf
- Ministry of National Development Planning. (2017). *Pilar Pembangunan Ekonomi*.
- Nur M. Munzil, Dompok Napitupulu, R. (2021). Integrasi Program Berkelanjutan dalam Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Tunggal Ilir. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 3(1), 54–63.
- Pigawati, R. N. B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(2), 267–281.
- Santosa, N. S., Sitorus, S. R. P., Machfud, & Sobandi, R. (2012). Analisis Keberlanjutan Kawasan Permukiman Perkotaan Cisauk Di Das Cisadane. *Jurnal Permukiman*, 7(2), 88–94.
- Simarmata, D. S., Tresiana, N., & Hutagalung, S. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(3), 343–359. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.104>
- Widodo, I. P., & Yuliasuti, N. (2013). Penilaian Keberlanjutan Permukiman Di Kelurahan Bugangan Kota Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(1), 191–197.
- Yusuf, A., & Prayogi, L. (2020). Tinjauan Konsep Keberlanjutan Pada Kawasan Pemukiman Summarecon Bekasi Dalam Aspek Sosial. *Arsitektur PURWARUPA*, 04(2), 23–30.